



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI KEBIJAKAN ZONASI PENDIDIKAN

Staf Ahli Menteri Bidang
Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

LATAR BELAKANG

LANDASAN FILOSOFI ZONASI PENDIDIKAN



**Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia**
(Sila ke-5 Pancasila)



**Tujuan Bernegara: setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan dan setiap warga
negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya.**

(Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945)

**PENDIDIKAN MERUPAKAN HAK DASAR WARGA NEGARA YANG WAJIB
DIPENUHI DENGAN BERPRINSIP KEADILAN SOSIAL**

LANDASAN YURIDIS ZONASI PENDIDIKAN



Pendidikan sebagai layanan dasar menjadi kewenangan wajib Pemda dan APBD harus diprioritas dalam pelaksanaan pelayanan dasar termasuk Pendidikan

(Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah)



Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi

(Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)



Zonasi Pendidikan merupakan upaya mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan

LANDASAN SOSIOLOGIS ZONASI PENDIDIKAN



Ketimpangan atau kesenjangan pendidikan antar daerah



Kuantitas dan kualitas sekolah belum merata (khususnya sarana prasarana dan guru)



Diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan, Sekolah murah lebih banyak dinikmati oleh anak dari keluarga yang mampu



Tidak terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)



Kondisi

IPM Ind. 2018 : 71,39 (naik hanya 0,82 (IPM 2017 : 70,81), pada Komponen tingkat lama sekolah semakin menurun mulai jenjang SMP, SMA dan PT. (data BPS).

ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH

Nawacita ke-5 : peningkatan kualitas SDM Indonesia

- 1. Visi Indonesia 2045: Pengembangan SDM & Pengusaan IPTEK**
- 2. Visi RPJP 2005-2025: Pembangunan Manusia yang Berkualitas**

RPJMN 2020-2024:

Arah Kebijakan & Strategi Produktivitas dan Daya Saing, Pendidikan & Palatihan Vokasi berbasis kerja sama Industri, Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas, Peningkatan Kapabilitas IPTEK dan Penciptaan Inovasi, dan Prestasi Olah Raga.

KONDISI AKSES PENDIDIKAN INDONESIA

1. Lulusan SDM Indonesia: 57,46% tamatan SMP dan SD
(Sakernas -Bappenas Agustus 2018)
2. Jumlah Sekolah
 - a. **SD: 148.244** (N:131.974, S; 16.270),
 - b. **SMP: 38.960** (N;23.227, S;15.733),
 - c. **SMA:13.495** (N:6.732, S;6.763),
 - d. **SMK:13.710** (N;3.519, S;10.191).

(Data Statistik Pendidikan Kemendikbud 2018)

KONDISI MUTU PENDIDIKAN INDONESIA



Ruang kelas rusak berat

125.950



Siswa Putus Sekolah

223.882



Guru Belum Tersertifikasi

56,4% SD

52,5% SMP

52,6% SMA

66,1% SMK



Belum melaksanakan UNBK

37% SMP

8,5% SMA

1,9% SMK



Rasio Guru PNS : Siswa

1:38 SD

1:35 SMP

1:34 SMA

1:59 SMK

KONDISI MUTU PENDIDIKAN INDONESIA



Guru PNS yang akan pensiun dalam 5 tahun

286.934



Rata-rata hasil UN

51,10 SMP

51,00 SMA IPA

45,69 SMA IPS

42,51 SMK

Sekolah yang Belum Terakreditasi

8,2% SD

15% SMP

14,6% SMA

27,5% SMK



Rasio Rombel: Siswa

1:23 SD

1:29 SMP

1:30 SMA

1:23 SMK



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

SISTEM ZONASI PENDIDIKAN

ZONASI PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN UNTUK PENINGKATAN PERLUASAN AKSES DAN *TRIGGER* UPAYA PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN



Penetapan
Zonasi
Pendidikan



PPDB merupakan
langkah awal
zonasi pendidikan
(USBN/UN tidak
lagi menjadi syarat
seleksi PPDB)



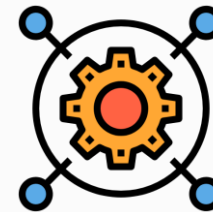
PERLUASAN AKSES DAN PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN



Pemenuhan jumlah
sekolah dan Pemerataan
infrastruktur dan sarpras



Pemenuhan, Penataan, &
Pemerataan Guru



Sharing
resource



Integrasi
pendidikan formal
dan non-formal

PEMANFAATAN ZONASI PENDIDIKAN



Mendekatkan anak dengan Sekolah sehingga mendukung program PPK (Perpres 87/2017),
Mengoptimalkan tri pusat pendidikan dalam tata kelola pendidikan



Menghilangkan label sekolah favorit dan unggulan dan menjadikan kondisi sekolah menjadi lebih heterogen



Menemukan lebih dini anak putus sekolah agar kembali bersekolah agar terwujud wajib belajar 12 tahun



Mendukung pemenuhan SPM oleh Pemda

TINDAK LANJUT ZONASI PENDIDIKAN

Pemetaan & Analisis



Ketersediaan daya tampung sesuai dengan usia peserta didik pada setiap jenjang



Penyediaan layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas



Ketersediaan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan



Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan



Capaian hasil belajar



Pemenuhan standar nasional pendidikan

TINDAK LANJUT ZONASI PENDIDIKAN

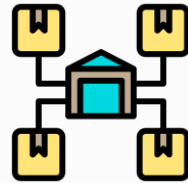
Intervensi Kebijakan



Intervensi
Kemendikbud



Pemenuhan sarana dan prasarana seperti unit sekolah baru, ruang kelas, dll



Berbagi sumber daya atau resource sharing dalam satu atau antar zona



Redistribusi dan pembinaan Kepala Sekolah dan Guru



Penguatan peran KKG/MGMP/MKKS/K3S antar jenjang pendidikan



Menjamin kontinuitas pembelajaran dan pembinaan siswa antar jenjang



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

PETA ZONASI

TOTAL PETA ZONASI PENDIDIKAN

Kemendikbud
telah
memetakan
2.580 Zona
di seluruh
Indonesia

No	Wilayah	Σ Zonasi
1	Prov. D.K.I. Jakarta	38
2	Prov. Jawa Barat	253
3	Prov. Jawa Tengah	323
4	Prov. D.I. Yogyakarta	53
5	Prov. Jawa Timur	325
6	Prov. Aceh	37
7	Prov. Sumatera Utara	116
8	Prov. Sumatera Barat	122
9	Prov. Riau	128
10	Prov. Jambi	39
11	Prov. Sumatera Selatan	68
12	Prov. Lampung	83
13	Prov. Kalimantan Barat	72
14	Prov. Kalimantan Tengah	29
15	Prov. Kalimantan Selatan	75
16	Prov. Kalimantan Timur	63
17	Prov. Sulawesi Utara	17

18	Prov. Sulawesi Tengah	22
19	Prov. Sulawesi Selatan	70
20	Prov. Sulawesi Tenggara	83
21	Prov. Maluku	90
22	Prov. Bali	65
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	31
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	77
25	Prov. Papua	33
26	Prov. Bengkulu	27
27	Prov. Maluku Utara	45
28	Prov. Banten	56
29	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	30
30	Prov. Gorontalo	6
31	Prov. Kepulauan Riau	40
32	Prov. Papua Barat	36
33	Prov. Sulawesi Barat	19
34	Prov. Kalimantan Utara	9
Total		2.580

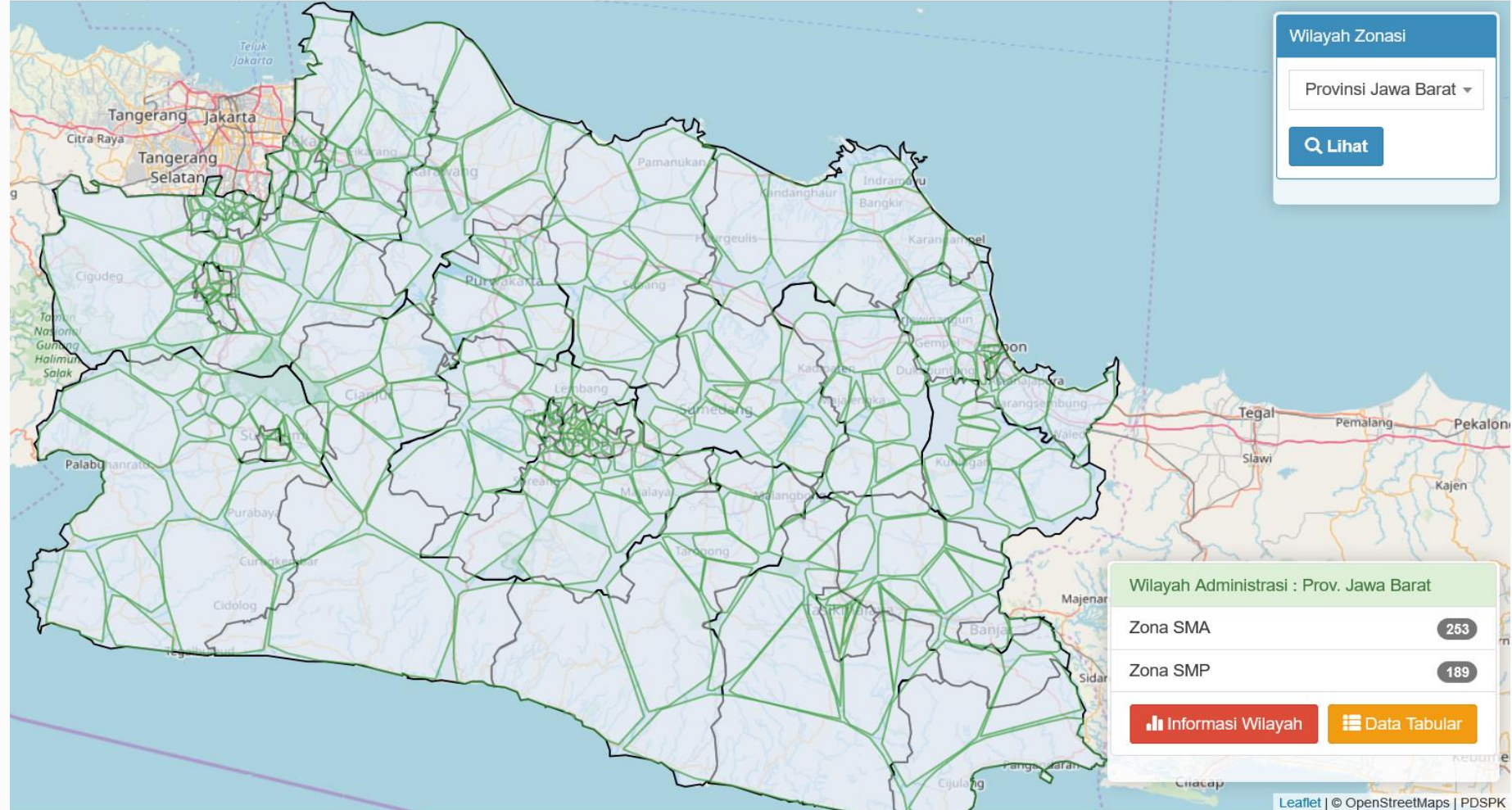
- Acuan pada titik Lokasi Satuan Pendidikan SD, SMP dan SMA
- Metode menggunakan Radius terdekat dengan Titik Pusat Zona pada masing jenjang yang memenuhi Akreditasi A atau B dan UN diatas rata-rata Nasional

PETA ZONASI PENDIDIKAN PROV. JAWA BARAT

Terdapat 253
Zona

Akses laman

<http://zonasi.data.kemdikbud.go.id/>

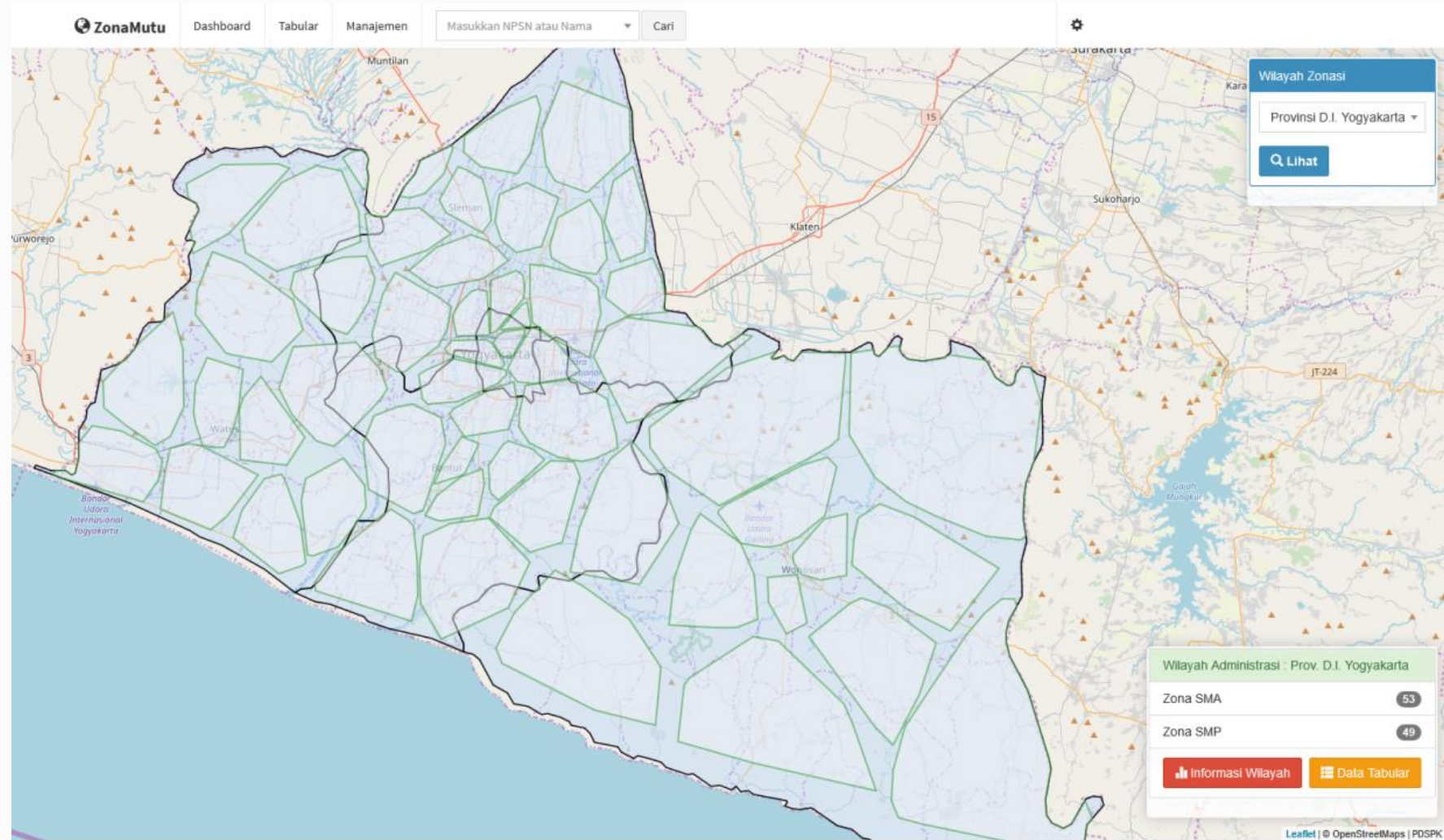


PETA ZONASI PENDIDIKAN PROV. DI. YOGYAKARTA

Terdapat 53 Zona

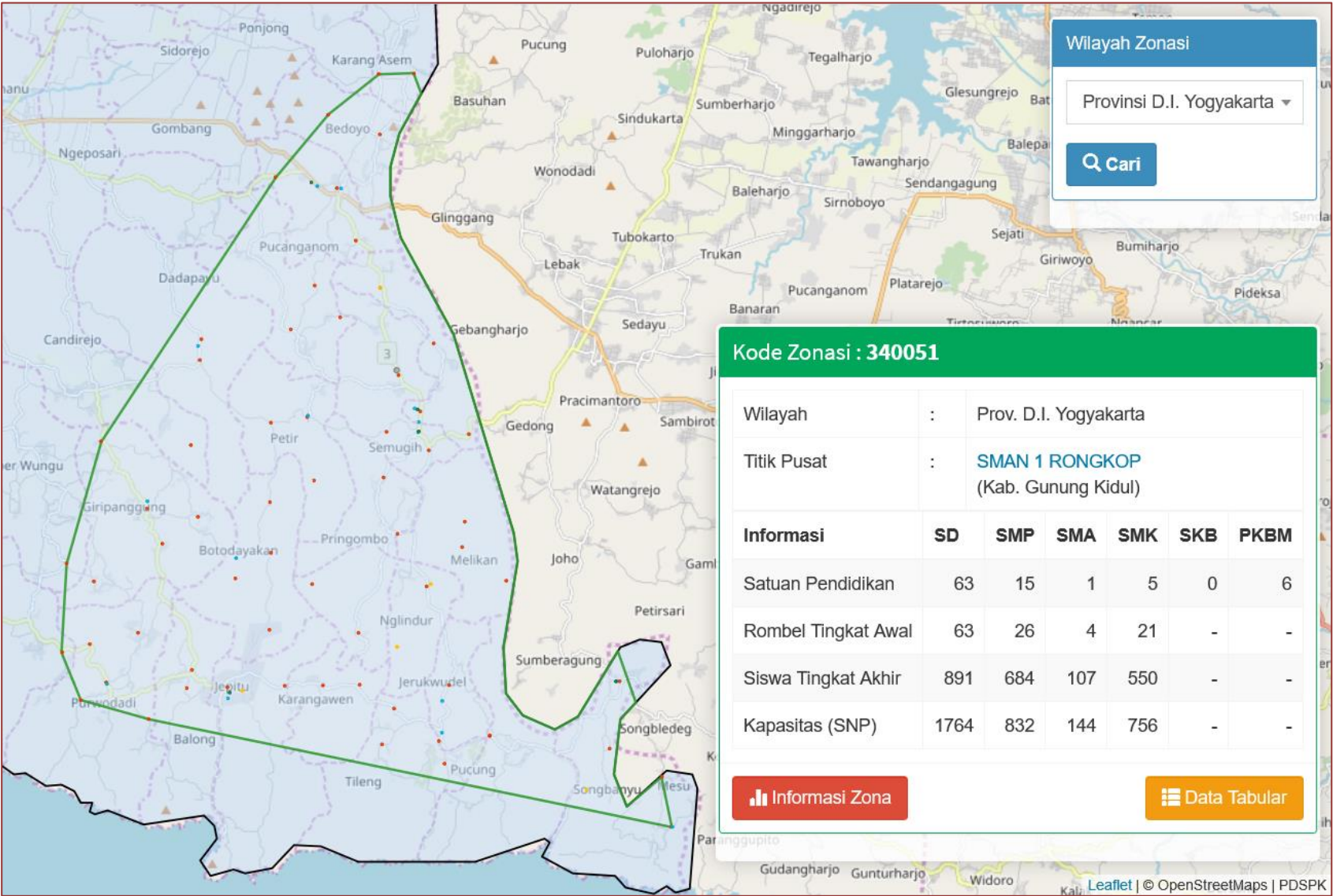
Akses laman

<http://zonasi.data.kemdikbud.go.id/>



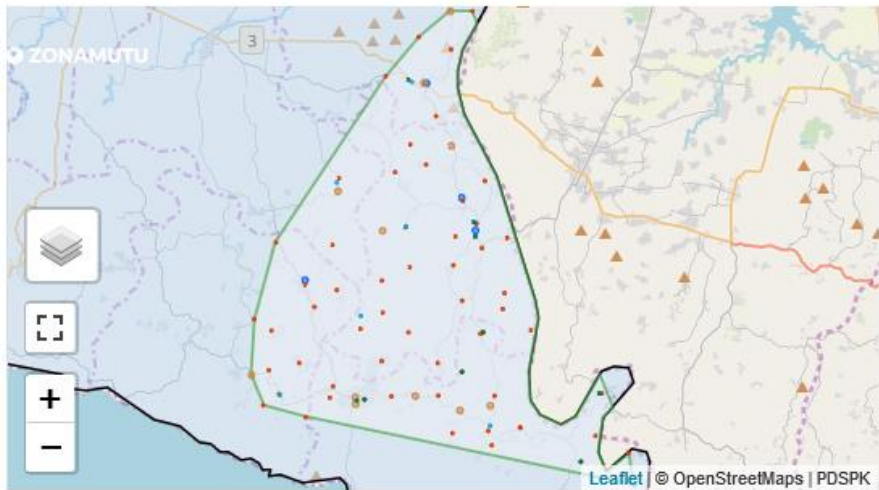
Contoh Zona 340051, Kab. Gunung Kidul

Pada Zona 340051
dengan titik pusat
SMAN 1 Rongkop
terdapat 63 SD dan 15
SMP



Akses laman
<http://zonasi.data.kemdikbud.go.id/>

Info Zona 340051, Kab. Gunung Kidul



Informasi Zonasi		
DASHBOARD TABULAR MANAJEMEN		
Kode Zonasi:	340051	
Wilayah:	Prov. D.I. Yogyakarta	
Wilayah Cakupan:	Kab. Gunung Kidul.	
Jenis Pendidikan:	SMA	
Titik Pusat:	20402118	SMAN 1 RONGKOP

Informasi Umum												
Kategori	SD			SMP			SMA			SMK		
	N	S	N+S	N	S	N+S	N	S	N+S	N	S	N+S
Satuan Pendidikan	58	5	63	7	8	15	1	0	1	2	3	5
Peserta Didik	4.623	235	4.858	1.480	424	1.904	323	0	323	1.086	502	1.588
a. Jenis Kelamin												
1. Laki-laki	2.383	135	2.518	786	246	1.032	110	0	110	662	325	987
2. Perempuan	2.240	100	2.340	694	178	872	213	0	213	424	177	601
b. Inklusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guru	419	29	448	92	45	137	20	0	20	58	36	94
a. Jenis Kelamin												
1. Laki-laki	203	12	215	54	31	85	10	0	10	36	18	54
2. Perempuan	216	17	233	38	14	52	10	0	10	22	18	40
b. Guru Kualifikasi Min. D-IV/S1	398	26	424	82	34	116	20	0	20	58	34	92
c. Guru Sertifikasi	207	9	216	79	19	98	17	0	17	39	11	50
Rombel	349	30	379	55	26	81	12	0	12	36	23	59
Ruang Kelas*)	328	30	358	55	29	84	9	0	9	29	24	53

*)Ruang Kelas dengan kondisi Baik, Rusak Ringan, dan Rusak Sedang.

Info Zona 340051, Kab. Gunung Kidul

Sarana Prasarana

Indikator	SD	SMP	SMA	SMK
% Kepemilikan Laboratorium IPA	7.94%	80%	0%	40%
% Kepemilikan Laboratorium Biologi	0%	0%	100%	0%
% Kepemilikan Laboratorium Kimia	0%	0%	100%	0%
% Kepemilikan Laboratorium Fisika	0%	0%	100%	0%
% Kepemilikan Laboratorium IPS	0%	0%	0%	0%
% Kepemilikan Laboratorium Bahasa	0%	13.33%	0%	20%
% Kepemilikan Laboratorium Komputer	17.46%	66.67%	100%	80%
% Kepemilikan Laboratorium Multimedia	0%	13.33%	0%	20%
% Kepemilikan Perpustakaan	80.95%	93.33%	100%	80%
% Kepemilikan Sanitasi Guru	87.3%	93.33%	100%	100%
% Kepemilikan Sanitasi Siswa	84.13%	86.67%	100%	100%



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

INTEGRASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA DALAM ZONASI

URGENSI PERLUNYA PERATURAN PRESIDEN TERKAIT ZONASI PENDIDIKAN



Peraturan
Presiden
membantu
mengintegrasikan
K/L dalam
mendukung zonasi
pendidikan



Kemendagri

Mengoordinasikan
kepala daerah
dalam menyusun
kebijakan
pendidikan



Kemenag

Memastikan satuan
pendidikan formal dan
nonformal yang berada
di bawah
kewenangannya
diikutkan dalam Zonasi
Pendidikan



Kemenristekdikti

Menyinkronkan
Lembaga Pendidikan
Tenaga Kependidikan
sesuai dengan
kebutuhan guru
nasional



KemenPUPR

Membangun
infrastruktur
pendidikan
berbasis
zonasi



Kemenkeu

Menyediakan
anggaran dalam
pelaksanaan
zonasi
pendidikan



BAPPENAS

Menyusun
perencanaan tata
ruang wilayah
terkait bidang
pendidikan sesuai
Zonasi Pendidikan



KemenPANRB

Pengendalian
formasi guru

URGENSI PERLUNYA PERATURAN PRESIDEN TERKAIT ZONASI PENDIDIKAN



Peraturan Presiden
membantu mendorong
Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan
Zonasi Pendidikan



PERAN PEMDA DALAM PELAKSANAAN ZONASI PENDIDIKAN



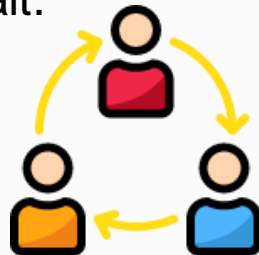
Menetapkan peta zona pendidikan yang memuat data seluruh sekolah baik di Pemda dan K/L terkait.



Membuat regulasi pelaksanaan kebijakan zonasi pendidikan



Menjamin pemerataan mutu pendidikan berdasarkan Zonasi Pendidikan



Pemda merotasi guru dan kepala sekolah berdasarkan zonasi pendidikan



Berkoordinasi dengan K/L lain untuk membangun kualitas pendidikan berdasarkan zonasi pendidikan

ZONASI PENDIDIKAN DI NEGARA LAIN



Amerika Serikat

Tujuan zonasi di Amerika Serikat mengurangi segregasi rasial atau perbedaan fasilitas antara mereka yang berkulit putih dan gelap



Jepang

Untuk masuk ke sekolah dasar negeri, Setiap orang tua di Jepang akan mendapatkan surat pemberitahuan sekolah untuk anaknya pada saat sudah masuk usia sekolah. Orang tua tidak mendaftar/memilih, tetapi sudah diatur oleh pemerintah.



Inggris

Berdasarkan usia anak dan jarak rumah ke sekolah, nomor urut pendaftaran tidak menjadi soal. Semakin dekat jarak rumah anak ke sekolah, maka semakin besar anak berpeluang diterima di sekolah tersebut

ZONASI PENDIDIKAN DI NEGARA LAIN



Australia

zonasi sekolah memungkinkan pemerintah untuk merencanakan pembangunan sekolah baru sesuai dengan demografis. Hal itu dirancang untuk merangkul keragaman sosial karena semua siswa yang tinggal di daerah tersebut harus mendaftar di sekolah mereka



Kanada

Kanada pernah mengadopsi sistem yang berbeda di setiap kotanya. Siswa sekolah dasar di Toronto wajib mengikuti sekolah di sekolah lokal, sementara anak-anak di Edmonton Vancouver memiliki pilihan untuk sekolah jauh



Finlandia

Memfokuskan kualitas pendidikan pada daerah yang memiliki murid yang berasal dari kalangan ekonomi lemah

EVALUASI PPDB

1. Juknis PPDB yang disusun Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud. Sehingga menyebabkan masyarakat kebingungan.
2. Penetapan zonasi oleh Pemerintah Daerah tidak memperhitungkan daya tampung sekolah dengan jumlah anak yang lulus dari jenjang sebelumnya.
3. Masih tingginya *mindset favoritism* di masyarakat.

TERIMA KASIH

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

